

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Arsyad,1997).

Sejak terjadinya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembakan perekonomian daerah masing-masing. Daerah tersebut semaki memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal (Nehen,2010).

Namun pembangunan suatu negara atau wilayah pada hakikatnya tidak selalu dikaitkan dengan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang banyak dipaparkan oleh sebagian besar negara-negara maju dan beberapa ekonom, tetapi aspek yang paling penting perlu diperhatikan yaitu pemerataan dan sisi berkelanjutan suatu pembangunan. Mencermati keadaan saat ini bahwasannya pembangunan yang dilakukan selama ini mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan melupakan aspek pemerataan dan distribusi spasial atas sumber daya yang ada.

Masalah yang paling lazim terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan tidak hanya terjadi antar pulau saja yang telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti sebelumnya yang mengemukakan bahwa terjadinya ketidak seimbangan antar wilayah Jawa dengan pulau-pulau lainnya atau antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan wilayah Indonesia yang diukur dengan Indeks Williamson dari tahun 1993 hingga tahun 2003 berkisar 0.56 di tahun 1993 dan menjadi 0.64 di tahun 2003. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya ketimpangan yang terjadi di Indonesia relatif masih tinggi dan terus mengalami peningkatan. Timbulnya masalah ketimpangan tidak lepas dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum sempurna. Perencanaan pembangunan daerah yang sering dilakukan saat ini bersifat fisik seperti perencanaan pembangunan proyek dari pada perencanaan pembangunan daerah secara terpadu (Lala Yuli Helena,2010).

Studi yang dilakukan Davey (1989) terhadap pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kenapa pemerintah Indonesia cenderung bersifat sentralistik dalam menjalankan proses pembangunannya. Pertama, kekhawatiran mengenai persatuan nasional dan kekhawatiran mengenai kekuatan-keuatan memecah yang mau tidak mau muncul dari keadaan yang kurang stabil pada awal kemerdekaan. Kedua, masalah memelihara keseimbangan politik dan keadilan dalam pembagian sumber daya antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan yang bersifat

sentralistik tersebut membuat ketimpangan wilayah yang sangat mencolok antar Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur (Sjafrizal: 2008).

Pada umumnya penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah, memberikan kesimpulan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan wilayah memiliki hubungan tradeoff. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atems (2012) di Amerika Serikat pada tahun 2000-2007, Zaman dan Khilji (2012) di Pakistan pada tahun 1964-2011, Martin (1999) di Negara-negara di Eropa pada tahun 1994-1999. Selanjutnya penelitian mengenai hubungan kesenjangan pendapatan dengan kebijakan ekspansi pengeluaran publik oleh Harun, dkk. (2012) di Malaysia pada tahun 2000-2009, memberikan hasil bahwa secara umum ekspansi pengeluaran publik meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Adanya realitas kesenjangan antar wilayah dan distribusi spasial atas sumber daya merupakan dampak dari proses pembangunan yang tidak merata. Pembangunan untuk sarana dan prasarana yang memadai dan cuku cangguh lebih diutamakan pada daerah yang cenderung dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketimpangan antar wilayah sangat erat kaitanya dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. wilayah atau daerah yang dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki sarana dan prasarana memadai akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, yang akan mengkaibatkan penyebaran kegiatan ekonomi menjadi tidak merata dan berdampak pada terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesenjangan masyarakat antara wilayah. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi dan

kesenjangan antara daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmurann dan kemajuan antar wilayah (Restiatun,2009).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemintraa antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Namun masalah pokok yang dalam pembangunan ekonomi adalah terletak pada penekan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Arsyad,1999).

Perbedaan kemajuan ekonomi suatu daerah dengan daerah lainnya disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta kecendrungan penanaman modal yang dilakukan oleh para investor pada daerah-daerah yang memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang lebih lengkap dan sumber daya manusia sudah terdidik dan terampil, pada umumnya pada pusat kota/pemerintah. Penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yaitu adanya ketimpangan retribusi pendapatan dari pemerintah ke daerah.

Menurut Todaro (2004), ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembangn untuk dapat bersaing dan meningkatkan

pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang sangat ekstrim adalah terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor terjadinya ketimpangan regional antar wilayah ini adalah, pertama kurangnya sumber-sumber daya manusia maupun lahan yang dimiliki, kedua pemusatan kegiatan ekonomi antar daerah atau wilayah, ketiga kecenderungan penanaman modal memilih daerah atau wilayah yang telah memiliki fasilitas, dan keempat tingkat mobilitas faktor produksi (modal, tenaga kerja) yang lemah antar daerah atau wilayah.

Mencermati fenomena ketimpangan yang ada sama halnya dengan melihat proses terjadinya konvergensi yang terjadi pada wilayah-wilayah tersebut. Karena konvergensi dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan atas semakin mengecilnya ketimpangan antar negara atau wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Konsep konvergensi dalam ekonomi dijelaskan bahwa suatu tingkat pendapatan perkapita yang lebih rendah tetapi bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat pada masa selanjutnya.

Dalam rangka untuk mencapai tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memiliki satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila suatu daerah kuat, maka akan terjadi perembetan pertumbuhan dan akan berdampak positif bagi daerah-daerah yang lemah di wilayah sekitarnya. Diharapkan pertumbuhan yang cepat di pusat pertumbuhan

dapat menetes ke bawah (*trickel down effect*), yaitu adanya pertumbuhan di daerah yang kuat akan menyerap potensi kerja atau mungkin daerah yang lemah sehingga dapat menghasilkan produk yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dengan produk yang dihasilkan daerah kuat.

Wilayah tengah Indonesia yaitu Nusa Tenggara Barat salah satu wilayah yang juga tidak lepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan, terlebih NTB termasuk salah satu daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesejangan distribusi pendapatan yang tidak merata. terlebih wilayah NTB juga terdiri dari 2 pulau yang dipisahkan oleh laut, pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang dimana ibukota provinsi berada dipulau lombok, dan kita dapat melihat bahwasannya pusat kegiatan ekonomi lebih banyak berada di pulau Lombok.

Dalam kasus di Nusa Tenggara Barat, konsentrasi aktifitas ekonomi relatif kuat yang ditunjukkan pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta yang bergerak dalam bidang sektor jasa. Pada tahun 1999 konsentrasi kegiatan atau pusat aktifitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat terletak di wilayah Kota Mataram. Namun setelah tahun 1999 pemusatan kegiatan ekonomi mulai terlihat pada Kabupaten Sumbawa.

Oleh karena itu aspek pemerataan yang pendapatan merupakan hal yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, jika tidak maka daerah yang tertinggal akan semakin miskin karena penduduknya akan memilih pindah ke daerah yang lebih menjanjikan kehidupannya.

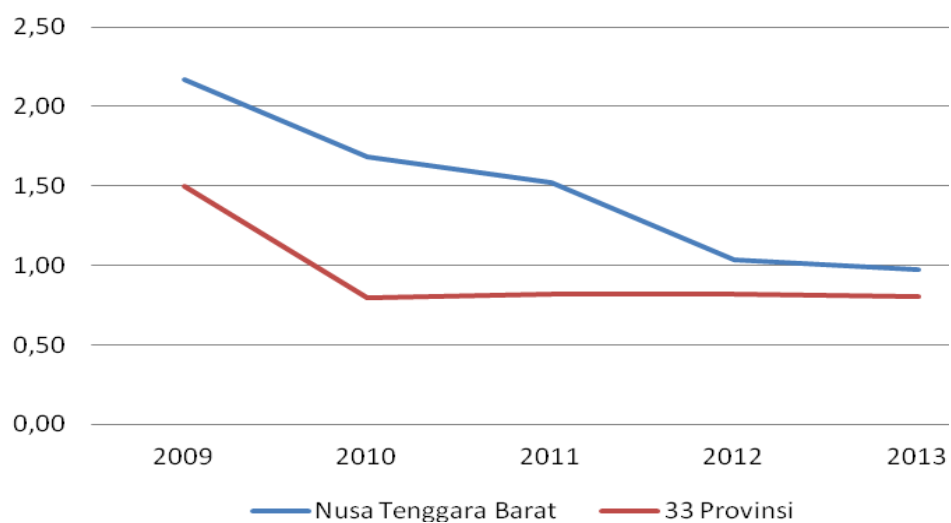
Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional
Tahun 2010-2014 (persen)

	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
NTB	-3,91	-1,54	5,15	5,06
Nasional	6,17	6,03	5,58	5,02

Sumber: BPS Nasional dan statistika Indonesia 2014

Terlihat dari tabel di atas bahwa terjadi fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan dan bernilai negatif sebesar -3,91 persen, laju pertumbuhan ekonomi NTB yang sangat jauh di bawah ekonomi nasional ini disebabkan karena produksi dari PT.Newmont mengalami penurunan, karena hasil produksi ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian NTB. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat jauh lebih tinggi sebesar 6,17 persen. Namun laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun selanjutnya mengalami tren penurunan. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi NTB meningkat dari tahun sebelumnya tetapi bernilai negatif sebesar -1,54 persen, perekonomian NTB masih didominasi oleh sektor primer dan pertambangan. Nilai negatif ini masih disebabkan karena penurunan dari produksi PT.Newmont yang memiliki peran penting dalam kontribusi perekonomian NTB dan berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami penurunan sebesar 6,03 persen. Selanjutnya pada tahun

2013 laju pertumbuhan ekonomi NTB jauh meningkat secara signifikan dengan nilai sebesar 5,15 persen. Dan laju pertumbuhan ekonomi nasional masih terus mengalami penurunan sebesar 5,58 persen. Dan pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional lagi-lagi mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,06 dan 5,02 persen.



Sumber : BPS Provinsi NTB, NTB dalam Angka 2014 (diolah)

Gambar 1.1 **Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) Tahun 2009-2013**

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat berkategori tinggi, menunjukkan perekonomian di kabupaten/kota di provinsi ini belum merata. Nilai Indeks williamson dari tahun 2009-2013 di NTB cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Dilihat dari grafik di atas menunjukkan kesenjangan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional.

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi terlihat dari besarnya gap antara kabupaten/kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan terendah.

Tabel 1.2
PDRB per Kapita Kabupaten/Kota NTB ADHK Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha 2011-2013 (persen)

Wilayah	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Lombok Timur	3,98	5,03	4,33	4,03	4,34
Lombok Tengah	4,5	7,75	10,85	5,01	7,02
Lombok Barat	3,02	4,11	3,23	3,36	3,43
Lombok Utara	2,88	4,39	3,00	2,44	3,17
Sumbawa	4,75	5,62	5,58	5,49	5,36
Sumbawa Barat	9,29	-28,38	-29,12	2,89	-11,33
Bima	3,27	4,61	4,59	4,38	4,21
Dompu	2,93	6,11	5,06	3,55	4,41
Kota Bima	3,43	2,76	3,32	3,19	3,17
Kota Mataram	5,66	5,29	0,81	5,75	4,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, NTB dalam Angka 2014

Pada tabel di atas ada perbedaan PDRB per Kapita pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di NTB. Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 terjadi fluktuasi terhadap laju PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di NTB. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per kapita kabupaten Lombok Timur dari tahun 2010-2013 sebesar 4,34 persen dari *share* PDRB Lombok Timur sebesar 2,86 Juta. Sementara kabupaten Sumbawa Barat memiliki rata-rata yang paling sedikit dan bernilai negatif selama kurun waktu 2010 sampai 2013 sebesar -11,33 persen, dengan PDRB *share* Sumbawa Barat sebesar 32, 66 juta ini disebabkan karena adanya penurunan rata-rata produksi dari PT.Newmont pada tahun 2011 dan 2012 sebesar

-28,38 persen dan -29,12 persen yang menyebabkan penurunan tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Kondisi perekonomian NTB yang salah satu direfleksikan dengan besaran PDRB, pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 56.277 milyar. Sementara jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali dan Provinsi NTT, nilai PDRB Provinsi NTB berada di antara kedua provinsi tersebut. Provinsi Bali memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu sebesar RP. 83.939 Milyar, sedangkan PDRB Provinsi NTT sebesar Rp. 35.253 Milyar (statistika daerah NTB, 2014).

Tabel 1.3
Perbandingan PDRB dan PDRB per Kapita Provinsi Bali, NTB, dan NTT
Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB ADHB (Rp Milyar)			
Bali	74.030	83.943	94.5556
NTB	48.824	49.529	56.277
NTT	31.219	35.248	40.465
PDRB Per Kapita			
Bali	74.030	83.943	22.934
NTB	48.824	49.529	10.102
NTT	31.219	35.248	7.569

Sumber: Statistika daerah Provinsi NTB 2014

Disamping dilihat dari perbandingan PDRB dan PDRB per Kapita, adapun perbandingan yang dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi regional, ada beberapa indikator terpilih yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penduduk Miskin Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2013.

Tabel 1. 4
Perbandingan Indikator Terpilih Provinsi Bali, NTB dan NTT Tahun 2013
(persen)

Indikator	Bali	NTB	NTT
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,83	5,38	3,25
IPM	74,11	67,73	68,77
Penduduk Miskin	4,49	17,97	20,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional 2014

Dilihat dari tahun 2013 pembangunan manusia Provinsi NTB sudah berada pada level menengah ke atas. Namun level ini IPM NTB masih berada di bawah Bali dan NTT dengan IPM NTB sebesar 67,73 persen. Sementara itu dilihat dari persentase penduduk miskin di NTB sebesar 17,97 persen, juga berada di antara Bali dan NTT.

Ketimpangan pembangunan yang khususnya terjadi di daerah, terlebih daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan daerah tertinggal sangat memerlukan perhatian serta penanganan dari pemerintah sebagai penggerak ekonomi sehingga ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat diminimalisir dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis hendak melakukan penelitian dengan Judul “ Analisis Disparitas Ekonomi Pembangunan di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus antar Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2006-2013)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, dimana setiap daerah memiliki permasalahan tingkat ketimpangan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda-beda, maka perlu diadakan pembatasan masalah.

Penelitian ini difokuskan pada analisis dengan melibatkan empat variabel bebas dari sisi ekonomi dan non-ekonomi. Empat variabel tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Swasta dan PDRB Per Kapita.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/kota NTB?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB?
3. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB?
4. Bagaimana pengaruh PDRB Per Kapita terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh IPM terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB Per Kapita terhadap ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota NTB

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Orang Lain

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang mementingkan ketimpangan pembangunan antar wilayah disamping pertumbuhan ekonomi.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi terkait dengan disparitas ekonomi.